

KINERJA KEPOLISIAN BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA KANTOR KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGAH

Irfan Harun^{*1}, Daniel T.Todapa², Muh Husain Borahima³

^{*1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Panca Marga Palu

Email: irfanjo2010@gmail.com

Abstrak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kinerja Kepolisian Bidang Hubungan Masyarakat Dalam Keterbukaan Informasi Publik Pada Kantor Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah belum cukup baik, yang dimana dari empat aspek yang dikemukakan oleh Anwar Prabu Mangkunegara (2009:75) dua aspek berjalan cukup optimal. Yaitu Aspek Kualitas yang dimana kualitas keterbukaan informasi publik yang diberikan oleh Bidang Humas Polda Sulawesi Tengah sudah cukup baik, terutama dalam hal akurasi dan kecepatan. Aspek Kuantitas yang dimana kuantitas informasi yang diberikan oleh Bidang Humas Polda Sulawesi Tengah sudah cukup banyak dan terus mengalami peningkatan. Informasi disebarakan melalui berbagai saluran, termasuk media sosial dan siaran pers. Sedangkan Aspek Pelaksanaan Tugas dan Aspek Tanggung Jawab belum cukup baik dan perlu ditingkatkan lagi, untuk mengoptimalkan kinerja bidang hubungan masyarakat.

Kata Kunci : Humas Polda, Tanggung Jawab, Pelaksanaan Tugas, Kualitas, Kuantitas

Abstract

The results of this study show that the performance of the Police in the Public Relations Sector in Public Information Disclosure at the Central Sulawesi Regional Police Office is not good enough, where of the four aspects proposed by Anwar Prabu Mangkunegara (2009:75) two aspects are quite optimal. Namely the Quality Aspect where the quality of public information disclosure provided by the Public Relations Division of the Central Sulawesi Police is quite good, especially in terms of accuracy and speed. The Quantity aspect, where the quantity of information provided by the Public Relations Division of the Central Sulawesi Police has been quite a lot and continues to increase. Information is disseminated through various channels, including social media and press releases. Meanwhile, the Implementation Aspects of Duties and Responsibilities are not good enough and need to be improved again, to optimize the performance of the public relations sector.

Keywords: *Public Relations of the Police, Responsibility, Implementation of Duties, Quality, Cooperation.*

PENDAHULUAN

Kepolisian Republik Indonesia merupakan Lembaga Negara yang memiliki peranan sangat penting di dalam masyarakat. Secara resmi negara mengatur wewenang dan tugas pokok Polri sesuai dengan Undang-Undang No 2 Tahun 2002, pasal 13 “Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Menegakkan Hukum, Memberikan Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan Masyarakat”.

Senada dengan hal tersebut untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kemasyarakatan melalui pelayanan publik senantiasa masyarakat bahwa polisi harus mengakan supermasi hukum, hak asasi manusia, demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas serta tuntutan masyarakat terhadap mererintah yaitu pemerintah yang bersih, bertanggung jawab dan professional semakin kuat. Demikian halnya Kepolisian

Negara Republik Indonesia (POLRI) merupakan salah satu institusi pemerintah yang memiliki tugas pokok sebagai perlindungan, pengayom, dan pelayanan masyarakat. Karena itu kemampuan kepolisian untuk memahami tugas pokok tersebut semakin perlu di tingkatkan dimana pelindung adalah anggota polri yang memiliki kemampuan memberikan bimbingan, petunjuk, arahan, dorongan, ajakan pesan dan nasehat yang dirasakan bermanfaat bagi masyarakat guna tercapainya rasa aman dan tentram. Sedangkan pelayanan polri di maknai adalah anggota polri yang setiap Langkah pengabdianya dilakukan secara bermoral, beretika, ramah,, dan profesional.

Persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat diletakan pada Pundak kepolisian agar kehidupan berbangsa dan bernegara mulai dari pusat kedaerah dapat terhindar dari ancaman-ancaman baik internal maupun eksternal. Hal ini di tegasakan pada undang-undang nomor 2 tahun 2002 pasal 13 dan 14 tentang kepolisian dinilai bahwa posisi Negara Republik Indonesia terletak pada dua benua Australia dan benua Indonesia itu sendiri dimana posisi tersebut memiliki strategi baik itu ancaman, tantangan, sekaligus menjadi peluang untuk berinteraksi dengan negara lain yang bersifat positif, karena itu tingkat ketertiban dan keamanan merupakan hal yang penting yang dipandang memiliki fungsi internal yang mengamankan masyarakat agar pelaksanaan program pembangunan dapat tercapai dengan baik, baik dari pencapaian pembangunan secara efisien maupun efektif. Kepolisian merupakan Lembaga yang penting dalam menangani berbagai fenomena konflik sosial baik itu konflik anantara kelompok masyarakat maupun konflik wilayah kecamatan dan desa yang bisa berwujud pada tindak pidana sehingga di butuhkan kemampuan polisi untuk mencari solusi melalui Tindakan yang berkeadilan agar setiap persoalan dapat menegakan peraturan sebagai mana yang telah di atur prosedur tetap maupun Kitab Undang Hukum Pidana

Pekerja pers melaksanakan pekerjaan mengisi ruang demi ruang pada halaman-halaman surat kabar, sebagai hasil konstruksi dari satu realitas sosial yang tak terlepas dari kebijakan pemilik modal. Berita yang disiarkan menjadi bagian untuk memperbaharui intelektualitas khalayak dalam berkomunikasi pada lingkungannya. Berita juga menjadi sumber atau acuan dalam memberikan kontribusi untuk membangun dan membentuk opini publik, termasuk dalam pengambilan keputusan bagi pemangku kepentingan dan pelayanan masyarakat. Berdasarkan UU Pokok Pers No.40 tahun 1999 fungsi pers, yakni mendidik, menghibur dan kontrol sosial serta fungsi ekonomi, namun dalam perkembangannya, informasi yang dirancang sedemikian rupa menjadi komoditi, tak terkecuali terjadi bagi penerbit koran di Sulawesi Tengah. Produk media tradisional yang modalnya dikuasai konglomerat berimbas terhadap penyajian konten berita di medianya (koran) masing-masing. Berdasarkan analisis peneliti banyak pemberitaan yang cenderung terkontaminasi kepentingan tertentu. Praktisi Pers di Sulawesi Tengah, Asril Chaniago berpendapat, isi berita sangat dipengaruhi oleh pemilik modal media tersebut. Hal itu tidak dapat disalahkan, karena biaya penerbitan koran mahal dan harus didukung investasi besar, yakni untuk pengadaan mesin cetak butuh dana miliaran rupiah, belum lagi biaya pekerja, kertas tanpa ada subsidi pemerintah, dan tak ada keringanan keringanan lainnya dari pemerintah. Kondisi ini memicu biaya tinggi dalam penerbitan surat kabar, sehingga harga halaman atau ruang-ruang dalam surat kabar begitu mahal, dan menuntut isi berita yang disajikan harus punya nilai dan menarik pembacanya, bahkan terbuka melayani isi berita sesuai dengan pesanan pengguna surat kabar guna mempengaruhi publiknya.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mengatur : Hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik Kewajiban

badan publik untuk menyediakan dan melayani permintaan informasi yang dikecualikan kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi Peran Komisi Informasi sebagai lembaga mandiri yang menjalankan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana, program, dan proses pengambilan kebijakan publik Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan public. Beberapa manfaat dari UU KIP adalah: Memberikan jaminan hak bagi setiap orang, Mendorong penyelenggaraan negara yang baik, Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Tugas Kepolisian yang dinilai paling efektif pada terjadinya kejahatan dalam penanggulangan dan pengungkapan suatu tindak kejahatan adalah tugas preventif, karena cakupan tugasnya yang sangat luas dan dirumuskan dengan kata-kata boleh berbuat apa saja asal keamanan terpelihara dan tidak melanggar hukum itu sendiri. Preventif itu sendiri dilakukan dengan 4 kegiatan pokok yaitu : mengatur, menjaga, mengawal dan patroli. Fungsi patroli merupakan kegiatan yang dominan dilakukan untuk mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan agar tidak terjadi gangguan keamanan, dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Tentunya dalam pencegahan suatu tindak kejahatan diperlukan pengetahuan tentang kejahatan itu terjadi, keadaan lingkungan yang dipengaruhi oleh keadaan sosial, budaya dan kultur sehingga dalam penanggulangan dan pengungkapan suatu tindak kejahatan diperlukan personil yang mempelajari hal itu serta mendapatkan cara yang tepat dalam penanggulangannya. Pelaksanaan operasi rutin kepolisian maka tugas patroli meliputi antara lain jam rawan, tempat rawan, dan cara melakukan kejahatan yang sangat efektif mampu mencegah kejahatan dan menciptakan ketertiban umum, yang merupakan syarat mutlak peningkatan kualitas hidup dan ketentraman masyarakat

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti menemukan hal yang berkaitan dengan kinerja kepolisian dalam keterbukaan informasi publik. Dimana masih kurang maksimal dalam kinerja aparat dalam memberikan informasi kepada jurnalis. Dan masih kurang koordinasi antara kasus-kasus yang ditangani oleh pihak kepolisian kepada jurnalis, Selain itu tingkat kinerja aparat sudah sangat maksimal dalam melaksanakan tugasnya. Faktor yang mempengaruhi kinerja aparat selain kurangnya personil, dan perlunya mendapatkan motivasi dari pimpinan sangatlah penting sebagai proses untuk menjamin bahwa aparat kepolisian menjalankan tugas sesuai tujuan organisasi dan standar kinerja yang sudah ditentukan.

Dari masalah tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui jawabannya melalui penelitian yang berjudul: “Kinerja Kepolisian Bidang Hubungan Masyarakat Dalam Keterbukaan Informasi Publik Pada Kantor Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah”

Berdasarkan pengamatan awal yang diuraikan di atas maka yang menjadi permasalahan adalah Bagaimana Kinerja Kepolisian Bidang Hubungan Masyarakat Dalam Keterbukaan Informasi Publik Pada Kantor Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah

METODE

Desain Penelitian

Penelitian kali ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, yang mementingkan makna dibalik suatu fakta, Berg dalam Satori dan Komariah (2009:23) menyatakan pendekatan kualitatif cenderung mengarah pada penelitian yang bersifat naturalistik naturalistik fenomenologis dan penelitian etnografi.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas maka penelitian kualitatif tidak hanya sebagai upaya mendeskripsikan data tetapi deskripsi tersebut hasil dari pengumpulan data yang sah yang dipersyaratkan kualitatif yaitu wawancara mendalam, observasi partisipasi, studi dokumen, dan dengan melakukan triangulasi. Juga deskripsinya berdasarkan analisis data yang sah juga mulai dari *display* datanya, reduksi data, refleksi data, kajian *emic* dan etik terhadap data dan sampai kepada pengambilan kesimpulan yang harus memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi berdasarkan ukuran *dependability*, *credibility*, *transferability*, dan *confirmability*.

Sedangkan penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2007 : 8) menyatakan bahwa : Metode penelitian *kualitatif* adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana penelitian adalah sebagai *instrumen* kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara *triangulasi* atau gabungan, analisis bersifat induktif dan hasil penelitian *kualitatif* lebih menekankan makna dari pada *generalisasi*. Penelitian survey dilakukan untuk membuat generalisasi dari sebuah pengamatan dan hasilnya akan lebih akurat. Metode survey digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan memberikan kuesioner, karena data diperoleh langsung dari sampel yang diambil populasinya

Jenis dan Sumber Data

Jenis data pada penelitian ini yang di maksud adalah subjek dari mana data yang diperoleh. Data yang diperoleh dibagi kedalam dua jenis data, yaitu:

Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan sebagai objek penelitian melalui wawancara dengan informan.

Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari sumber lain yang memiliki kaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini yang dimaksud data sekunder adalah buku, koran, skripsi, jurnal, internet, peraturan-peraturan, atau undang-undang.

Informan Penelitian

Informan pada penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive*, yaitu dengan memilih orang-orang yang dianggap mengetahui dan mampu memberikan informasi yang relevan dengan fokus permasalahan yang akan diteliti. Hal ini sesuai dengan pendapat (Sugiyono, 2012:85), yang menyatakan bahwa *purposive* adalah teknik penentuan pada informan dengan pertimbangan tertentu. Sumber data dan informasi penelitian ini adalah para pihak yang dipandang mengetahui secara mendalam berbagai hal menyangkut masalah penelitian informasi sehingga mampu memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam rangka menjawab permasalahan penelitian. Informan Dalam penelitian ini yaitu: Kepala Bidang Humas Polda Sulawesi Tengah, Kasubbag Humas Polda Sulawesi Tengah, Wartawan Media Lokal, Aktivistis Transparansi Publik, Masyarakat Pengguna Layanan Informasi Publik

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh informasi dan data yang validasinya dapat dipertanggung jawabnya, maka dalam penelitian ini sumber data yang diperlukan, diperoleh dari 2

(dua) sumber yaitu data yang bersumber dari Kantor Kepolisian Bidang Hubungan Masyarakat

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa teknik diantaranya sebagai berikut :

- 1) Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses yang tersusun dari proses biologis dan psikologis dua diantara yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan. Sedangkan Arikunto menjelaskan bahwa observasi dalam artian penelitian dapat dilaksanakan dengan tes kuesioner rekaman gambaran maupun rekaman suara, teknik dilakukan langsung dilapangan dengan mengamati berbagai hal yang sedang dilakukan (Arikunto, 2006: hal 229).
- 2) Wawancara. Adapun wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data-data pendukung lainnya sebagai bahan pelengkap hasil wawancara. pengumpulan data yang dibutuhkan dengan tanya jawab secara langsung
- 3) Dokumentasi. Metode dokumentasi menurut Arikunto, (2006:231), adalah “mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, legger, agenda dan sebagainya”. jadi, dokumentasi merupakan pencarian data mengenai sesuatu hal yang berupa catatan buku, surat kabar, agenda dan sebagaimana yang ada hubungannya dengan fokus penelitian Kantor Kepolisian Resor Bidang Hubungan Masyarakat

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah kembali dari lapangan. Analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data dalam penelitian secara kualitatif akan lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data bukan setelah selesai pengumpulan data.

Analisis data dilakukan untuk menafsirkan dan memberi pemahaman terhadap hasil wawancara subjek penelitian. Miles dan Huberman (Herdiansyah, 2015) mengemukakan beberapa tahapan dalam menganalisis data dalam penelitian kualitatif, yaitu sebagai berikut:

1. Tahap pengumpulan data

Tahap pengumpulan data adalah mengumpulkan data dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dicatat dalam catatan lapangan deskripsi dan tafsiran. Catatan deskripsi adalah data alami yang berisi apa yang dilihat, didengar, dirasakan, disaksikan, dan dialami sendiri terkait fenomena yang diteliti. Sedangkan catatan refleksi adalah kesan, komentar, tafsiran peneliti tentang semua yang dijumpai.

2. Kondensasi data

Kondensasi data, data lapangan dituangkan dalam uraian laporan yang lengkap dan terinci. Data dan laporan lapangan kemudian direduksi, dirangkum, dan kemudian dipilah-pilah hal yang pokok, difokuskan untuk dipilih yang terpenting kemudian dicari tema atau polanya (melalui proses penyuntingan, pemberian kode dan pentabelan). Reduksi data dilakukan terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Setelah data dipilah kemudian disederhanakan, data yang tidak

diperlukan disortir agar memberi kemudahan dalam proses penampilan, penyajian, serta untuk menarik kesimpulan sementara.

3. Tahap display data

Tahap display data adalah proses pengolahan data setengah jadi yang sudah diseragamkan dalam bentuk tulisan dan sudah memiliki alur tema yang jelas ke dalam matriks kategorisasi sesuai dengan tema-tema yang sudah di kelompokkan, serta memecah tema-tema tersebut menjadi bentuk yang lebih sederhana dan konkrit, yang disebut sub-tema dan diakhiri dengan pemberian kode (*coding*) dari sub tema-tema tersebut sesuai dengan verbatim wawancara yang dibuat sebelumnya.

4. Tahap kesimpulan/verifikasi

Tahap terakhir adalah tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang dihasilkan mungkin dapat menjawab rumusan masalah, tetapi mungkin juga tidak dapat menjawab rumusan masalah karena rumusan masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan dapat berkembang setelah dilakukan penelitian di lapangan. Secara esensial kesimpulan berisi tentang uraian dari seluruh sub tema yang telah dikategorisasikan dan *coding* yang telah dilakukan.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan bersamaan dengan pengambilan data, proses tersebut akan terus berlangsung secara terus menerus sampai data yang didapatkan jenuh. Berikut ini adalah gambaran alur teknik analisis data dengan model interaktif yang di kemukakan oleh Miles dan Huberman (Herdiansyah, 2015)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Isi Hasil dan Pembahasan

Kualitas

Kualitas yaitu Seberapa baik seorang aparat mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan untuk mencapai sebuah tujuan. Berikut hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan terkait Aspek Kualitas Kinerja Kepolisian Bidang Hubungan Masyarakat Dalam Keterbukaan Informasi Publik Pada Kantor Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah.

Informan Pertama, Kombes Pol. Djoko Wienartono, S.I.K.,S.H.,M.H., selaku Kabidhumas Polda Sulteng mengatakan bahwa :

"Kami selalu berpegang pada prinsip transparansi dan akurasi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Setiap informasi yang kami rilis sudah melalui proses verifikasi dan koordinasi dengan pihak terkait agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Selain itu, kami juga memanfaatkan berbagai media, baik cetak maupun digital ataupun konferensi pers, untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan mudah dipahami."

Berdasarkan hasil wawancara di atas dikatakan bahwa Kepala Bidang Humas Polda Sulawesi Tengah, selalu berpegang pada prinsip transparansi dan akurasi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Setiap informasi yang kami rilis sudah melalui proses verifikasi dan koordinasi dengan pihak terkait agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Selain itu, bahwa Kepala Bidang Humas Polda Sulawesi Tengah, juga memanfaatkan berbagai media, baik cetak maupun digital, untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan mudah dipahami."

Selanjutnya informan Kedua, Kasubbid, yang bernama AKBP Sugeng Lestari selaku Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Sulteng mengatakan bahwa :

"Kami terus meningkatkan kapasitas personel humas melalui pelatihan jurnalistik, media handling, dan komunikasi publik. Selain itu, kami juga membuka akses bagi masyarakat untuk bertanya langsung melalui berbagai platform digital, seperti media sosial dan website resmi Polda. Dengan begitu, kami bisa memastikan bahwa informasi yang diberikan benar-benar memenuhi standar keterbukaan informasi publik."

Berdasarkan hasil wawancara di atas dikatakan bahwa Humas Polda Sulawesi Tengah, terus meningkatkan kapasitas personel humas melalui pelatihan jurnalistik, media handling, dan komunikasi publik. Selain itu, Humas Polda Sulawesi Tengah, juga membuka akses bagi masyarakat untuk bertanya langsung melalui berbagai platform digital, seperti media sosial dan website resmi Polda Sulteng. Dengan begitu, Humas Polda Sulawesi Tengah, bisa memastikan bahwa informasi yang diberikan benar-benar memenuhi standar keterbukaan informasi publik.

Selanjutnya informan Ketiga, Iptu Fatmawaty selaku Paur Penun Subbid Penmas Bidhumas Polda Sulteng mengatakan bahwa :

"Secara umum, kualitas informasi yang diberikan sudah cukup baik, terutama dalam hal kecepatan dan keakuratan. Namun, terkadang ada beberapa informasi yang masih bersifat formal dan kurang detail bagi masyarakat awam. Mungkin akan lebih baik jika humas bisa lebih proaktif dalam menjelaskan kebijakan atau kejadian tertentu dengan bahasa yang lebih sederhana dan komunikatif."

Berdasarkan hasil wawancara di atas dikatakan bahwa dikatakan bahwa Secara umum, kualitas informasi yang diberikan sudah cukup baik, terutama dalam hal kecepatan dan keakuratan. Namun, terkadang ada beberapa informasi yang masih bersifat formal dan kurang detail bagi masyarakat awam. Mungkin akan lebih baik jika humas bisa lebih proaktif dalam menjelaskan kebijakan atau kejadian tertentu dengan bahasa yang lebih sederhana dan komunikatif.

Berikut informan Kelima, Priyatno selaku Lihat Sulteng Mengatakan bahwa :

"Saya pernah mengajukan permohonan informasi mengenai layanan kepolisian, dan responnya cukup baik. Namun, ada beberapa informasi yang masih membutuhkan waktu cukup lama untuk didapatkan. Akan lebih baik jika ada sistem layanan informasi yang lebih cepat dan mudah diakses, misalnya melalui aplikasi khusus atau layanan chatbot yang bisa menjawab pertanyaan masyarakat secara otomatis."

Berdasarkan hasil wawancara di atas dikatakan bahwa ada beberapa informasi yang masih membutuhkan waktu cukup lama untuk didapatkan. Akan lebih baik jika ada sistem layanan informasi yang lebih cepat dan mudah diakses, misalnya melalui aplikasi khusus atau layanan chatbot yang bisa menjawab pertanyaan masyarakat secara otomatis.

Hasil wawancara di atas terkait Aspek Kualitas dapat disimpulkan bahwa kualitas keterbukaan informasi publik yang diberikan oleh Bidang Humas Polda Sulawesi Tengah sudah cukup baik, terutama dalam hal akurasi dan kecepatan. Namun, masih ada beberapa tantangan, seperti penyampaian informasi yang lebih komunikatif, peningkatan responsivitas terhadap pertanyaan publik, serta pengembangan sistem layanan informasi yang lebih cepat dan mudah diakses. Dengan perbaikan di aspek tersebut, diharapkan keterbukaan informasi publik dapat lebih optimal dan mendukung transparansi serta kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian.

Kuantitas

Kuantitas yaitu seberapa lama seorang aparat bekerja dalam satu harinya. Kuantitas kerja ini dapat dilihat dari kecepatan kerja setiap aparat itu masing-masing. Untuk mengetahui bagaimana Kinerja Kepolisian Bidang Hubungan Masyarakat Dalam Keterbukaan Informasi Publik Pada Kantor Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, dari Aspek Kuantitas. Berikut Hasil wawancara dengan beberapa informan :

Informan yang pertama, Kombes Pol. Djoko Wienartono, S.I.K.,S.H.,M.H., selaku Kabidhumas Polda Sulteng mengatakan bahwa :

"Kami secara rutin merilis informasi kepada publik, baik melalui media sosial, website resmi, maupun siaran pers di berbagai media. Setiap harinya, kami setidaknya mengunggah beberapa informasi terkait keamanan, kegiatan kepolisian, serta imbauan kepada masyarakat. Selain itu, kami juga mengadakan konferensi pers secara berkala untuk memberikan informasi yang lebih mendalam."

Berdasarkan hasil wawancara di atas dikatakan bahwa Bidang Humas Polda Sulawesi Tengah secara rutin merilis informasi kepada publik, baik melalui media sosial, website resmi, maupun siaran pers di berbagai media. Setiap harinya, setidaknya mengunggah beberapa informasi terkait keamanan, kegiatan kepolisian, serta himbauan kepada masyarakat. Selain itu, juga mengadakan konferensi pers secara berkala untuk memberikan informasi yang lebih mendalam.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan Kedua, AKBP Sugeng Lestari selaku Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Sulteng mengatakan bahwa :

"Kami terus berupaya meningkatkan jumlah informasi yang kami sampaikan agar masyarakat bisa lebih memahami tugas dan kebijakan kepolisian. Saat ini, kami sudah memiliki sistem yang memungkinkan penyebaran informasi lebih cepat dan lebih banyak, termasuk melalui platform digital seperti Instagram, Facebook, dan Twitter. Namun, kami juga menyadari bahwa masih ada ruang untuk meningkatkan jumlah informasi yang bisa diakses oleh masyarakat."

Hasil wawancara di atas dikatakan bahwa Humas Polda Sulawesi Tengah terus berupaya meningkatkan jumlah informasi yang kami sampaikan agar masyarakat bisa lebih memahami tugas dan kebijakan kepolisian. Saat ini, Humas Polda Sulawesi Tengah sudah memiliki sistem yang memungkinkan penyebaran informasi lebih cepat dan lebih banyak, termasuk melalui platform digital seperti Instagram, Facebook, dan Twitter. Namun, Humas Polda Sulawesi Tengah juga menyadari bahwa masih ada ruang untuk meningkatkan jumlah informasi yang bisa diakses oleh masyarakat.

Berikut hasil wawancara dengan Djunaedi selaku Metro Sulawesi mengatakan bahwa :

"Dibandingkan beberapa tahun lalu, sekarang jumlah informasi yang diberikan jauh lebih banyak. Namun, dalam beberapa kasus, ada informasi yang kami butuhkan tetapi belum segera dipublikasikan. Akan lebih baik jika jumlah informasi yang diberikan bisa lebih merata, terutama dalam kejadian-kejadian yang membutuhkan klarifikasi cepat."

Berdasarkan wawancara di atas dikatakan bahwa Dibandingkan beberapa tahun lalu, sekarang jumlah informasi yang diberikan jauh lebih banyak. Namun, dalam beberapa kasus, ada informasi yang kami butuhkan tetapi belum segera dipublikasikan. Akan lebih baik jika jumlah informasi yang diberikan bisa lebih merata, terutama dalam kejadian-kejadian yang membutuhkan klarifikasi cepat.

Selanjutnya informan Keempat, Iptu Fatmawaty selaku Paur Penun Subbid Penmas Bidhumas Polda Sulteng mengatakan bahwa :

"Secara kuantitas, informasi yang diberikan oleh Humas Polda Sulawesi Tengah sudah mengalami peningkatan yang cukup baik. Namun, masih ada beberapa informasi yang seharusnya bisa lebih banyak dipublikasikan, terutama terkait data statistik kriminalitas, perkembangan kasus-kasus tertentu, serta hasil evaluasi kinerja kepolisian. Dengan meningkatkan jumlah informasi yang tersedia, kepercayaan publik terhadap kepolisian akan semakin meningkat."

Berdasarkan hasil wawancara di atas dikatakan bahwa Secara kuantitas, informasi yang diberikan oleh Humas Polda Sulawesi Tengah sudah mengalami peningkatan yang cukup baik. Namun, masih ada beberapa informasi yang seharusnya bisa lebih banyak dipublikasikan, terutama terkait data statistik kriminalitas, perkembangan kasus-kasus tertentu, serta hasil evaluasi kinerja kepolisian. Dengan meningkatkan jumlah informasi yang tersedia, kepercayaan publik terhadap kepolisian akan semakin meningkat.

Yang selanjutnya informan Kelima, Priyatno selaku Lihat Sulteng Mengatakan bahwa

"Informasi dari kepolisian cukup banyak tersedia, terutama di media sosial dan berita online. Namun, terkadang kami masih kesulitan mendapatkan informasi spesifik, seperti prosedur layanan tertentu atau perkembangan kasus yang sedang viral. Akan lebih baik jika ada portal informasi yang lebih lengkap dan bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat."

Berdasarkan hasil wawancara di atas dikatakan bahwa Informasi dari kepolisian cukup banyak tersedia, terutama di media sosial dan berita online. Namun, terkadang kami masih kesulitan mendapatkan informasi spesifik, seperti prosedur layanan tertentu atau perkembangan kasus yang sedang viral. Akan lebih baik jika ada portal informasi yang lebih lengkap dan bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dapat terkait Aspek Kuantitas, disimpulkan bahwa kuantitas informasi yang diberikan oleh Bidang Humas Polda Sulawesi Tengah sudah cukup banyak dan terus mengalami peningkatan. Informasi disebarkan melalui berbagai saluran, termasuk media sosial dan siaran pers. Namun, ada beberapa aspek yang masih perlu diperbaiki, seperti meningkatkan jumlah informasi yang bersifat klarifikasi cepat, menyediakan lebih banyak data statistik, serta memperluas akses masyarakat terhadap informasi yang lebih spesifik. Dengan penambahan kuantitas informasi yang lebih merata dan sistematis, keterbukaan informasi publik di kepolisian akan semakin optimal.

Pelaksanaan Tugas

Pelaksanaan tugas yaitu seberapa jauh seorang aparat mampu melakukan pekerjaannya dengan akurat atau tidak ada kesalahan. Dalam hal ini bagaimana Kinerja Humas Polda Sulawesi Tengah dalam melaksanakan tugas memberikan informasi layanan public kepada masyarakat. Berikut hasil wawancara dengan beberapa informan :

Informan Pertama, Kombes Pol. Djoko Wienartono, S.I.K.,S.H.,M.H., selaku Kabidhumas Polda Sulteng mengemukakan bahwa :

"Kami menjalankan tugas sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Setiap informasi yang

kami sampaikan harus melalui proses verifikasi agar akurat dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Kami juga secara rutin melakukan konferensi pers, mengelola media sosial, serta menyediakan layanan informasi bagi masyarakat yang membutuhkan klarifikasi."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Humas Polda Sulawesi Tengah, dapat dikatakan bahwa Humas Polda Sulawesi Tengah, menjalankan tugas sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Setiap informasi yang Humas Polda Sulawesi Tengah, sampaikan harus melalui proses verifikasi agar akurat dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Humas Polda Sulawesi Tengah, juga secara rutin melakukan konferensi pers, mengelola media sosial, serta menyediakan layanan informasi bagi masyarakat yang membutuhkan klarifikasi.

Informan Kedua, AKBP Sugeng Lestari selaku Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Sulteng mengatakan bahwa :

"Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang menangani informasi publik. Kami harus memilah informasi yang bisa dibagikan sesuai regulasi, sehingga membutuhkan waktu dalam penyampaianya. Selain itu, koordinasi dengan unit lain juga menjadi tantangan, terutama dalam memberikan informasi yang cepat namun tetap akurat."

Berdasarkan hasil wawancara di atas dikatakan bahwa Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang menangani informasi publik. Humas Polda Sulteng harus memilah informasi yang bisa dibagikan sesuai regulasi, sehingga membutuhkan waktu dalam penyampaianya. Selain itu, koordinasi dengan unit lain juga menjadi tantangan, terutama dalam memberikan informasi yang cepat namun tetap akurat.

Selanjutnya informan Ketiga, Iptu Fatmawaty selaku Paur Penum Subbid Penmas Bidhumas Polda Sulteng mengatakan bahwa :

"Secara umum, pelaksanaan tugas Humas dalam keterbukaan informasi publik sudah berjalan dengan baik, terutama dalam hal koordinasi dengan media. Namun, ada beberapa situasi di mana informasi yang dibutuhkan oleh publik tidak segera diberikan. Kami berharap ada mekanisme yang lebih cepat dalam penyampaian informasi, terutama dalam kejadian darurat atau kasus yang menjadi perhatian masyarakat luas."

Berdasarkan hasil wawancara di atas dikatakan bahwa ada beberapa informasi lain yang masih sulit diakses, terutama yang berkaitan dengan perkembangan suatu kasus. Mungkin akan lebih baik jika ada layanan informasi yang lebih interaktif dan bisa memberikan respon secara real-time kepada masyarakat.

Secara holistik terkait Aspek Pelaksanaan Tugas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas Humas Polda Sulawesi Tengah dalam keterbukaan informasi publik sudah berjalan cukup baik, terutama dalam hal penyampaian informasi melalui media sosial, konferensi pers, dan koordinasi dengan wartawan. Namun, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti keterbatasan sumber daya manusia, proses verifikasi informasi yang membutuhkan waktu, serta perlunya mekanisme yang lebih cepat dalam penyampaian informasi kepada publik. Dengan peningkatan sistem koordinasi dan penggunaan teknologi informasi yang lebih optimal, keterbukaan informasi publik dapat lebih efektif dan efisien.

Tanggung Jawab

Tanggung Jawab yaitu Kesadaran akan kewajiban seorang aparat untuk melaksanakan pekerjaan yang diberikan oleh pimpinan dan lembaga Negara. Dalam hal ini bagaimana Kinerja Humas Polda Sulawesi Tengah dalam melaksanakan tugas memberikan informasi layanan public kepada masyarakat. Berikut hasil wawancara dengan beberapa informan :

Informan Pertama, Kombes Pol. Djoko Wienartono, S.I.K.,S.H.,M.H., selaku Kabidhumas Polda Sulteng mengatakan bahwa :

"Kami bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang benar, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami juga harus memastikan bahwa setiap informasi yang kami sampaikan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat dan tetap dalam koridor hukum. Oleh karena itu, kami selalu melakukan verifikasi sebelum merilis informasi ke publik."

Berdasarkan hasil wawancara di atas dikatakan bahwa Humas Polda Sulawesi Tengah bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang benar, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Humas Polda Sulawesi juga harus memastikan bahwa setiap informasi yang disampaikan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat dan tetap dalam koridor hukum. Oleh karena itu, Humas Polda Sulawesi selalu melakukan verifikasi sebelum merilis informasi ke publik.

Berikutnya informan Kedua, AKBP Sugeng Lestari selaku Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Sulteng mengatakan bahwa :

"Kami bertanggung jawab untuk menjawab setiap pertanyaan dari masyarakat, baik secara langsung melalui konferensi pers maupun melalui media sosial dan layanan informasi publik. Jika ada informasi yang kurang jelas atau menimbulkan mispersepsi, kami juga bertugas untuk segera memberikan klarifikasi agar masyarakat mendapatkan pemahaman yang benar."

Hasil wawancara di atas mengatakan bahwa Humas Polda Sulawesi Tengah bertanggung jawab untuk menjawab setiap pertanyaan dari masyarakat, baik secara langsung melalui konferensi pers maupun melalui media sosial dan layanan informasi publik. Jika ada informasi yang kurang jelas atau menimbulkan mispersepsi, Humas Polda Sulawesi Tengah juga bertugas untuk segera memberikan klarifikasi agar masyarakat mendapatkan pemahaman yang benar."

Selanjutnya informan Ketiga, Iptu Fatmawaty selaku Paur Penum Subbid Penmas Bidhumas Polda Sulteng mengatakan bahwa :

"Saya melihat bahwa Humas sudah berusaha menjalankan tanggung jawabnya dengan cukup baik. Mereka aktif memberikan informasi dan menjawab pertanyaan dari media. Namun, dalam beberapa kasus tertentu, terkadang ada keterlambatan dalam memberikan tanggapan, terutama untuk informasi yang sensitif. Saya berharap ada mekanisme yang lebih cepat dalam penyampaian klarifikasi."

Berdasarkan hasil wawancara di atas dikatakan bahwa Humas sudah berusaha menjalankan tanggung jawabnya dengan cukup baik. Mereka aktif memberikan informasi dan menjawab pertanyaan dari media. Namun, dalam beberapa kasus tertentu, terkadang ada keterlambatan dalam memberikan tanggapan, terutama untuk informasi yang sensitif.

Berikutnya informan Keempat, Djunaedi selaku Metro Sulawesi mengatakan bahwa:

"Tanggung jawab Humas dalam keterbukaan informasi publik sangat besar, dan saya melihat sudah ada upaya ke arah yang lebih baik. Namun, ada beberapa informasi yang seharusnya bisa diakses dengan lebih mudah oleh masyarakat. Sebagai contoh, data statistik kejahatan dan perkembangan kasus-kasus tertentu sebaiknya bisa diakses secara terbuka tanpa perlu permintaan khusus."

Hasil wawancara di atas mengatakan bahwa Humas cukup bertanggung jawab dalam memberikan informasi. Namun, ada beberapa informasi lain yang membutuhkan waktu lebih lama untuk diperoleh. Akan lebih baik jika ada sistem yang lebih transparan dan responsif agar masyarakat bisa mendapatkan informasi lebih cepat.

Secara holistic dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab Humas Polda Sulawesi Tengah dalam keterbukaan informasi publik sudah cukup baik, terutama dalam hal penyampaian informasi melalui media resmi dan klarifikasi terhadap isu-isu yang berkembang. Namun, ada beberapa tantangan yang perlu diperbaiki, seperti meningkatkan kecepatan respons terhadap pertanyaan publik, memperluas akses informasi yang bersifat non-rahasia, serta memastikan mekanisme keterbukaan informasi yang lebih transparan dan mudah diakses. Dengan tanggung jawab yang lebih optimal, Humas Polda Sulawesi Tengah dapat semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan juga pengamatan di lapangan terkait Kinerja Kepolisian Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) Dalam Keterbukaan Informasi Publik Pada Kantor Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah cukup baik, yang dimana dari empat aspek yang dikemukakan oleh Anwar Prabu Mangkunegara (2009:75) dua aspek berjalan cukup optimal. Yaitu Aspek Kualitas yang dimana kualitas keterbukaan informasi publik yang diberikan oleh Bidang Humas Polda Sulawesi Tengah sudah cukup baik, terutama dalam hal akurasi dan kecepatan. Aspek Kuantitas, yang dimana kuantitas informasi yang diberikan oleh Bidang Humas Polda Sulawesi Tengah sudah cukup banyak dan terus mengalami peningkatan. Informasi disebarkan melalui berbagai saluran, termasuk media sosial dan siaran pers. Sedangkan Aspek Pelaksanaan Tugas dan Aspek Tanggung Jawab perlu ditingkatkan lagi

SARAN

Aspek Tanggung Jawab yang dimana harus lebih meningkatkan kecepatan respons terhadap pertanyaan publik, memperluas akses informasi yang bersifat non-rahasia, serta memastikan mekanisme keterbukaan informasi yang lebih transparan dan mudah diakses. Dengan tanggung jawab yang lebih optimal, Humas Polda Sulawesi Tengah dapat semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Aspek Pelaksanaan Tugas yang dimana ada adanya peningkatan sumber daya manusia, serta perlunya mekanisme yang lebih cepat dalam penyampaian informasi kepada publik. Serta peningkatan sistem koordinasi antar unit

DAFTAR PUSTAKA

A.A Anwar Prabu Mangkunegara. (2005). *Manajemen Sumber daya Manusia*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Arikun, Suharsimi 2010, *Manajemen penelitian*, Rineka Cipta Jakarta

- Hasibuan, Malayu, S.P. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia* Jakarta: Bumi Aksara. Jakarta: raja Grafindo Persada
- Mangkunegara, A A anwar prabu, 2000, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Remaja Rosda Karya, Bandung
- Pasolong, Harbani, 2008. *Teori Administrasi Publik*, Alfabeta, Bandung
- Bernard saryawati 2012. *Sasaran Efektivitas*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Cambel. J.P. 1989. *Riset Dalam efektivitas Organisasi*. Terjemahan Sabat Simamira. Erlangga. Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi, 2013, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Hidayat. 1986. *Teori Efektifitas Dalam Kinerja Karyawan*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta
- Fathoni, Abdurrahmat, 2006, *Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Moleong L.J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung.
- Undang-Undang Pokok Pers nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mengatur hakikat dan aturan untuk memperkuat pers di Indonesia dalam era demokrasi
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik